

PERSEPSI MAHASISWA UPS TEGAL TERHADAP REKRUITMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA TEGAL TAHUN 2009 -2014

Oleh :

Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal terhadap Rekrutmen Calon Anggota legislative Perempuan di Kota Tegal Tahun 2009 – 2014 serta ingin mengetahui harapan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal terhadap calon anggota legislative perempuan apabila terpilih. Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif, Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, di mana masing-masing Fakultas diambil 10 orang dengan cara random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal mempunyai penilaian yang baik terhadap rekrutmen calon anggota legislative perempuan, di mana rekrutmen yang dilakukan partai politik telah memenuhi persyaratan perundang-undangan dan sesuai mekanisme partai yang ada, serta pola yang dipakai sudah sesuai keinginan masyarakat. Harapan terhadap calon legislative perempuan apabila terpilih dapat merealisasikan janji kampanye, memperjuangkan kepentingan perempuan serta mewujudkan *clean government*.

Kata Kunci : Persepsi, Rekrutmen, Calon anggota legislative Perempuan

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat mebahirkan teori Negara Demokrasi, yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Tata cara untuk menjadi wakil rakyat yang modern adalah melalui pemilu, karena ini memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Melalui pemilu akan terseleksi wakil rakyat yang terpercaya dan mempunyai kemampuan menjadi wakil.

Ketika terjadi proses pembangunan system politik di Indonesia, bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, fungsi keterwakilan rakyat secara konseptual mendapatkan tempat yang sama. Pemilu 2004 merupakan tonggak sekaligus momentum perubahan yang mendasar, dimana setiap warga negara yang sudah dan masih memiliki hak pilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih calonnya secara langsung, baik calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Sudah saatnya perspektif gender masuk ke segala lini kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Apabila hal tersebut selama ini belum sempat dilakukan, semata – mata karena kehidupan sosio politik Indonesia yang hanya dilihat dari kacamata laki-laki. Sementara warga perempuan sendiri kian terpinggirkan dan dianggap tidak layak memasukinya. Politik dianggap sebagai dunia yang kejam dan kotor.

Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen 30%, parpol telah berusaha untuk menominasikan calon legislative perempuan, sehingga diharapkan dalam pemilu mendatang caleg perempuan mampu mengusung agenda perempuan dan memiliki kemampuan yang memadai sehingga anggota legislative betul-betul merupakan hasil rekrutmen yang tepat dari partai politik dan memenuhi harapan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah

satu fungsi parpol adalah fungsi rekrutmen politik. Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan diparlemen 3%, parpol telah berusaha untuk menominasikan calon legislative perempuan, sehingga diharapkan dalam pemilu mendatang caleg perempuan mampu mengusung agenda perempuan dan memiliki kemampuan yang memadai sehingga anggota legislativa betul-betul merupakan hasil rekrutmen yang tepat dari partai politik dan memenuhi harapan yang ada.

Melihat betapa pentingnya peranan dan beratnya tugas legislative mendatang, maka dibutuhkan orang-orang yang “tepat”, untuk itu dalam rekrutmen partai politik harus benar-benar selektif, tidak terkecuali terhadap caleg perempuan.

Mahasiswa sebagai salah satu pilar penegak civil society di Indonesia, diharapkan mampu mengkritisi kebijakan pemerintah dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Mereka masih memiliki “idealisme yang murni”, sehingga diharapkan lebih bisa tepat dan obyektif dalam menyuarakan suara-suara moralnya, tidak terkecuali bagi terpilihnya calon legislative yang berkualitas dan berwawasan gender.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana persepsi mahasiswa UPS Tegal terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislative Perempuan Kota Tegal tahun 2009 – 2014.

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Ingin mengetahui persepsi mahasiswa UPS Tegal terhadap rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Kota Tegal Tahun 2009 – 2014.
- b. Ingin mengetahui harapan mahasiswa UPS Tegal terhadap Calon Legislatif Perempuan Kota Tegal mendatang.

4. TINJAUAN PUSTAKA

4.1. REKRUITMEN POLITIK

Salah satu kemungkinan ketika individu dalam masyarakat aktif berpartisipasi politik adalah menduduki jabatan – jabatan di pemerintahan, baik jabatan administrator maupun jabatan politik. Proses politik yang biasanya mengantarkan untuk menuju jabatan – jabatan tersebut adalah “Rekrutmen Politik”. Rekrutmen merupakan kenyataan yang selalu hadir dalam segala kehidupan politik, terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan partisipasi politik dalam masyarakat.

Budiardjo (2004 : 164) mendefinisikan rekrutmen politik “sebagai seleksi kepemimpinan, mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik”.

Dalam lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yaitu rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.

Meskipun rekrutmen politik lebih dikenal sebagai proses elitis, namun rekrutmen politik dapat bersifat :

- a. Top Down; artinya rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat.
- b. Bottom Up; artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah, seperti mendaftarkan diri dari individu – individu untuk menduduki suatu jabatan.
- c. Bersifat campuran, yaitu proses seleksi tahap pertama dilaksanakan di tingkat atas, kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Begitu pula sebaliknya proses seleksi pertama diselenggarakan ditingkat bawah kemudian diserahkan kepada keputusan tingkatan paling atas. Biasanya praktek rekrutmen politik ini terdapat pada proses pemilu, baik pemilu legislative maupun eksekutif

Pemilu dianggap sebagai cara yang modern untuk menjadi anggota legislative, karena cara ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyusun wakil mereka secara mandiri. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

4.2. PERSEPSI

Setiap orang memilih berbagai isyarat (cue) yang mempengaruhi persepsinya terhadap orang, obyek dan tanda. Karena factor-faktor ini, maka orang sering salah persepsi terhadap orang lain, kelompok atau obyek. Orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut :

Faktor Situasi (The Situational Factor)

Tekanan waktu, sikap orang yang bekerjasama dengan pengambil keputusan dan faktor-faktor situasi lain mempengaruhi ketelitian persepsi. Persepsi yang ditimbulkan dipengaruhi oleh waktu yang tersedia dan tingkah laku pemberi pelayanan.

Kebutuhan dan Keinginan (Needs and Perceptions)

Persepsi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda begitu juga keinginannya. Sehingga persepsi yang dihasilkan juga berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan keinginan seseorang pada waktu itu.

3. Emosi dan Persepsi (Emotions and Perceptions)

“Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dengan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada

lingkungan mereka. Apa yang dipersiapkan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif tidak harus demikian, tetapi sering kali terjadi ketidaksepakatan (Stephen P. Robbinson, 2001 : 88)”

4.3. CALON LEGISLATIF PEREMPUAN

Pemilu 2009 mendatang, caleg perempuan yang mengusung agenda perempuan dan memiliki kemampuan yang memadai sebagai anggota legislative perlu disosialisasikan ke masyarakat luas agar keberpihakan kepada caleg perempuan tidak terjebak pada keberpihakan yang hanya berdasarkan atas jenis kelamin tertentu dan bisa menjadi pelopor serta teladan dalam kepedulian dan kepekaan nurani.

Adanya keterwakilan perempuan diharapkan akan memberi warna cerah bagi lembaga perwakilan rakyat yang kian menipis citra positifnya di mata rakyat. Caleg perempuan diharapkan bisa menjadi pelopor bagi anggota wakil rakyat yang lain untuk mulai menggerakkan agenda good governance yang selama ini masih jauh dari harapan. Berbagai agenda seperti pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi masyarakat, perjuangan untuk kesetaraan harus dikedepankan. Harapan ini hendaknya jangan dianggap memberikan beban yang berlebihan kepada caleg perempuan. Sudah saatnyalah untuk membuktikan bahwa kehadiran caleg perempuan di parlemen akan memberikan perubahan yang nyata, sehingga suara miring tentang kuota perempuan bisa dihilangkan.

Tingkat pencapaian kuota 30 % perempuan dalam Pemilu Legislatif merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan, apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PU-IV/2008 yang membatalkan pasal terkait keterpilihan berdasar nomor urut, diganti model keterpilihan berdasar suara terbanyak; hal ini menunjukkan adanya “ pasar bebas “ dalam kompetisi Pemilu Legislatif 2009. Keputusan itu harus dipandang sebagai keberpihakan kepada perempuan, di mana dunia politik tidak lagi menjadi ranah laki-laki.

5.METODE PENELITIAN

5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat atau menemukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana persepsi mahasiswa UPS Tegal terhadap Rekrutmen Calon anggota legislative Perempuan Kota Tegal Tahun 2009- 2014.

5.2. Metode Pengumpulan Data

- a.Observasi,
- b.Wawancara,
- c.Questionaire,
- d. Kepustakaan

5.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UPS Tegal yang berjumlah kurang lebih 5000 (lima ribu) mahasiswa, tersebar ke dalam 6 fakultas, yakni FKIP, FH, FTI, FISIP, FP, FE. Pengambilan sample dilakukan dengan cara random sampling, di mana masing-masing fakultas diambil 10 mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 60 orang.

5.4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif

6. PEMBAHASAN

Partai politik sebagai salah satu komponen infra struktur politik mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik, salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen sebagai kegiatan yang penting, mengingat anggota merupakan aset setiap partai, Semakin banyak anggota semakin kuat partainya, demikian pula semakin banyak yang aktif dalam partai dan bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuat dan eksislah partai tersebut. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa partai harus berusaha merebut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideology dan nilai-nilai dasarnya, di samping itu harus menjaga loyalitas anggota dengan memberi kepuasan kepada mereka.

Perekrutan menjadi semakin penting, mengingat keberagaman anggota akan menjadikan partai lebih representative, dukungan menjadi semakin besar dan semakin banyak anggota, semakin banyak ide, opini dan pendapat yang terdapat dalam partai sehingga partai semakin dinamis. Proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan sebanyak mungkin ide dan pendapat yang berbeda pada umumnya menghasilkan keputusan yang lebih bagus, tentunya apabila aspek demokrasi diterapkan.

Selain merekrut anggota biasa, partai juga melakukan perekrutan terhadap aktifis partai pengurus partai, calon legislative dan staf professional serta calon yang akan duduk dalam eksekutif.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009, partai politik telah berusaha untuk melakukan rekrutmen terhadap kader-kadernya untuk duduk dalam lembaga Legislatif . Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 , khususnya pada pasal 8 ayat (1) memiliki substansi partai politik harus menyertakan minimal 30 % keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan. Dalam pasal 53 disebutkan bahwa calon legislative, terdapat sekurang-

kurangnya 30 % keterwakilan perempuan, dan pasal 55 ayat (2) mengatur system penyusunan daftar calon legislatif , di mana setiap 3 orang, sekurang-kurangnya terdapat 1 perempuan. Undang-undang ini telah mengakomodir wacana kesetaraan gender maupun tuntutan global tentang feminisme yang sulit dibendung di Negara manapun juga termasuk Indonesia.. Ketentuan pasal tersebut kemudian dianulir dengan keputusan Mahkamah Institusi No. 22-24/PUU- IV/2009 yang membatalkan pasal terkait keterpilihan calon legislative berdasar nomor urut, selanjutnya berimplikasi model keterpilihan berdasarkan suara terbanyak.

Terlepas dari perubahan aturan tersebut, partai politik tetap berusaha untuk menampilkan calon-calonnya yang dianggap mempunyai “ nilai Jual “ yang tinggi. Rekrutmen yang dilakukan berusaha untuk mewujudkan good governance seperti yang diidam-idamkan masyarakat, hal ini cukup beralasan mengingat pentingnya fungsi legislasi yang membutuhkan keahlian dan kapabilitas yang tinggi. Berbagai kalangan direkrut oleh partai politik untuk memperkuat jajarannya.

Pola rekrutmen, khususnya calon anggota legislative perempuan yang diterapkan oleh partai politik menurut persepsi atau pandangan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, cukup memenuhi syarat , karena telah memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota legislatif, antara lain tingkat pendidikan yang memadai, pengetahuan di bidang politik dan pemerintahan, pengalaman berorganisasi yang cukup serta memiliki sifat kenegaraan. Di samping itu pola rekrutmen yang dilakukan menurut pandangan Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal telah menerapkan pola yang sesuai dengan prosedur dari masing-masing partai.

Harapan yang besar disandarkan kepada calon legislative perempuan yang terpilih.Mereka dapat memenuhi janji pada saat kampanye, sebagai pejuang perempuan harus bisa memperjuangkan kepentingan perempuan dan tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan

clean government, sehingga kesan dan penilaian kinerja legislative selama ini dapat terkikis oleh kehadiran perempuan. Orientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus menjadi motivasi dalam setiap langkah anggota legislative perempuan. Apabila semua sudah dijalankan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perempuan di masa datang akan meningkat, sehingga tidak perlu lagi pembatasan 30 % keterwakilan perempuan. Tidak ada alasan lagi untuk menelorkan kebijakan yang affirmative bagi perempuan begitu public telah menyokong terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu.

7.PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, ternyata mempunyai referensi yang cukup baik dalam memberikan penilaian terhadap rekrutmen calon anggota legislative perempuan Kota Tegal tahun 2009 – 2014. Hal itu terbukti mereka sangat setuju atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislative perempuan, di mana persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan legislative yang kuat dan mempunyai kinerja yang baik.

2.Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal menilai pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam menyusun calon anggota legislative perempuan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun mekanisme partai,antara lain mengedepankan regenerasi, perekrutan yang dilakukan secara terbuka,maupun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat.

3.Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal mengharapkan calon anggota legislative perempuan yang terpilih dapat merealisasikan janjinya pada saat kampanye, memperjuangkan kepentingan perempuan dan yang tidak kalah pentingnya adalah ikut mewujudkan good governance.

B. REKOMENDASI

Untuk mendapatkan calon anggota legislative perempuan yang berkualitas, partai politik hendaknya melakukan rekrutmen secara continue dengan melakukan beberapa pembenahan, antara lain :

1. Melengkapi struktur organisasi yang lebih lengkap, sehingga aktifitas yang dilakukan tidak mengalami hambatan,
2. Karena eksistensi partai sangat tergantung pada anggota, dalam perekrutan perlu memperhatikan keragaman yang ada di dalam masyarakat, sehingga anggota akan mencerminkan heterogenitas.
3. Membentuk tim rekrutmen yang handal, menentukan kelompok sasaran yang tepat serta menentukan visi dan misi partai yang jelas.
4. Menjaga loyalitas anggota partai dengan cara antara lain : melibatkan anggota dalam kegiatan partai, memberi tanggungjawab tugas partai sesuai kemampuan, memberi penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan memberikan pelatihan kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Dzulkiyah Said, Gatam, *Sosiologi Politik, Konsep Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Dzulkiah Setia Bandung, 2007.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Budihardjo, Miriam . *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.

Hadi,Sutrisno *Methodologi Riset II*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.

Romani Sibite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Robbins, Stepen, *Perilaku Organisasi I*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Surbakti Ramlan *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Napitupulu, Pemimpin *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

UURI No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

UURI No. 10 Tahun 2008, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

Jurnal Perempuan No. 34, Tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.

